INOVASI ALPUKAT KESEPIAN DALAM PENINGKATAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nur Rahkmah Aulia Asri
NPP. 33.0943
Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email : rahkmahaulia18@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Udaya Madjid, M. Pd
Email : udayamadjid@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The low ownership of Child Identity Cards* (KIA) *and the complexity of population administration services highlight the need for more effective and accessible public service innovation. The* ALPUKAT KESEPIAN *innovation in* Takalar *Regency integrates services between the Department of Population and Civil Registration and health facilities to accelerate document processing since childbirth.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of this innovation in increasing* KIA *ownership in Takalar Regency, South Sulawesi Province.* ***Method:*** *This research uses a qualitative approach through interviews, observation, and documentation, with data analysis conducted through data reduction, display, and conclusion drawing, and applies the public sector innovation theory of Osborne and Brown (2013).* ***Result:*** *This study show that the innovation improves efficiency and accelerates services through process simplification, technology utilization, and inter-agency coordination, thereby increasing* KIA *ownership. This is indicated by an increase in KIA ownership from 24.45% in 2022 to 48.30% in 2025. However, the improvement reflects greater success in service acceleration than in equitable distribution, as there are still limitations in infrastructure, technical constraints, uneven human resource capacity, and low public awareness.* ***Conclusion:*** *This study concludes that strengthening is needed through equal distribution of infrastructure, increasing human resource capacity, and optimizing socialization so that innovation is more effective and evenly distributed in order to increase the speed of service and encourage an increase in KIA ownership in a more even, optimal, and sustainable manner in the Takalar Regency area.*
Keywords: *Child Identity Card* (KIA)*, Population Administration, Public Service Innovation*

ABSTRAK

Permasalahan: Rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) serta kompleksitas pelayanan administrasi kependudukan mendorong perlunya inovasi yang lebih efektif dan mudah diakses. Inovasi ALPUKAT KESEPIAN di Kabupaten Takalar merupakan integrasi

layanan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan fasilitas kesehatan untuk mempercepat pengurusan dokumen sejak anak lahir. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi dalam meningkatkan kepemilikan KIA di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data berupa reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta menggunakan teori inovasi sektor publik Osborne dan Brown (2013). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi ini mampu meningkatkan efisiensi dan mempercepat pelayanan melalui penyederhanaan proses, pemanfaatan teknologi, dan koordinasi antar instansi, sehingga mendorong peningkatan kepemilikan KIA. . Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kepemilikan KIA dari 24,45% pada tahun 2022 menjadi 48,30% pada tahun 2025. Namun, peningkatan tersebut lebih mencerminkan keberhasilan pada aspek percepatan dibandingkan pemerataan, karena masih terdapat keterbatasan infrastruktur, kendala teknis, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, serta rendahnya pemahaman masyarakat. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan melalui pemerataan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sosialisasi agar inovasi lebih efektif dan merata agar mampu meningkatkan kecepatan pelayanan dan mendorong peningkatan kepemilikan KIA secara lebih merata, optimal, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Takalar.
Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Inovasi Pelayanan Publik, Kartu Identitas Anak (KIA)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan hak anak merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara, termasuk hak atas identitas diri sebagai bentuk pengakuan hukum yang menjadi dasar dalam mengakses berbagai layanan publik. Dalam konteks tersebut, administrasi kependudukan memiliki peran strategis karena berkaitan dengan pencatatan peristiwa penting yang memberikan legalitas identitas penduduk serta menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan (Hutasoit, 2017). Salah satu bentuk pelayanan administrasi kependudukan yang berkontribusi dalam pemenuhan hak sipil anak adalah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen identitas resmi bagi anak berusia di bawah 17 tahun yang belum menikah. Keberadaan KIA tidak hanya berfungsi sebagai bukti identitas anak, tetapi juga mendukung akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan berbagai layanan publik lainnya. Selain itu, KIA memiliki nilai strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan, akurasi data anak, serta mendukung perumusan kebijakan pembangunan berbasis data kependudukan. Oleh karena itu, peningkatan kepemilikan KIA menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan inklusif.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2022, dari total 91.141 anak yang wajib memiliki KIA, hanya 22.288 anak atau sebesar 24,45% yang telah memiliki KIA. Angka tersebut masih jauh di bawah target nasional sebesar

60 persen. Selain itu, tingkat kepemilikan KIA antar kecamatan juga menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan, di mana Kecamatan Polombangkeng Selatan memiliki capaian tertinggi sebesar 34,22 persen, sedangkan Kecamatan Kepulauan Tanakeke hanya mencapai 16,66 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan, khususnya penerbitan KIA, masih menghadapi berbagai hambatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Rendahnya kepemilikan KIA mendorong perlunya inovasi pelayanan publik yang mampu meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas pelayanan administrasi kependudukan. Menurut Osborne dan Brown (2013), inovasi sektor publik merupakan upaya menghadirkan perubahan yang memberikan nilai tambah dalam proses, layanan, maupun tata kelola organisasi guna menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sejalan dengan itu, Hartley (2005) menjelaskan bahwa inovasi pelayanan publik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam era transformasi digital, inovasi pelayanan publik juga semakin didorong melalui pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses (Cordella dan Tempini, 2015; Dunleavy, dkk. 2006).

Sebagai bentuk inovasi pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar mengembangkan inovasi ALPUKAT KESEPIAN (Anak Lahir Ibu Pulang Membawa Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak). Inovasi ini mengintegrasikan pelayanan administrasi kependudukan dengan fasilitas kesehatan sehingga proses penerbitan akta kelahiran dan KIA dapat dilakukan sejak anak lahir melalui sinkronisasi data dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan.

Meskipun demikian, implementasi inovasi ALPUKAT KESEPIAN masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, ketimpangan infrastruktur teknologi, rendahnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi inovasi ALPUKAT KESEPIAN, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta upaya penguatan yang diperlukan agar inovasi tersebut mampu meningkatkan kepemilikan KIA secara lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa implementasi pelayanan administrasi kependudukan belum berjalan secara optimal dan merata. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2022, dari total 91.141 anak wajib KIA, hanya 22.288 anak atau 24,45% yang telah memiliki KIA, sementara sisanya belum memiliki dokumen identitas tersebut. Angka ini masih jauh dari target nasional kepemilikan KIA sebesar 60%, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan realisasi di lapangan. Ketimpangan capaian tersebut juga terlihat antarwilayah kecamatan, di mana Kecamatan Polombangkeng Selatan memiliki capaian sebesar 34,22%, sedangkan Kecamatan Kepulauan Tanakeke hanya mencapai 16,66%. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pelayanan

administrasi kependudukan belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat secara merata, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan geografis, infrastruktur, jaringan internet, dan sarana pelayanan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya KIA, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor turut menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan KIA di Kabupaten Takalar.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar menghadirkan inovasi ALPUKAT KESEPIAN (Anak Lahir Ibu Pulang Membawa Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) sebagai bentuk transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih proaktif, terintegrasi, dan berbasis fasilitas kesehatan. Inovasi ini dirancang untuk menyederhanakan proses pelayanan melalui integrasi data kelahiran antara fasilitas kesehatan dan Dinas Dukcapil, sehingga masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor pelayanan untuk mengurus akta kelahiran dan KIA. Namun demikian, meskipun inovasi ini telah diimplementasikan selama beberapa tahun, peningkatan kepemilikan KIA di Kabupaten Takalar masih belum menunjukkan hasil yang optimal dan merata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain inovasi pelayanan dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam terkait implementasi inovasi ALPUKAT KESEPIAN, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatannya, serta upaya penguatan inovasi agar mampu meningkatkan kepemilikan KIA secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Takalar.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi Kartu Identitas Anak (KIA), inovasi pelayanan administrasi kependudukan, dan transformasi pelayanan publik berbasis digital. Penelitian Rachmat, dkk. (2023) yang berjudul *Inovasi Pelayanan KIA secara Online melalui Aplikasi Si D'nOK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang* menemukan bahwa inovasi pelayanan berbasis aplikasi digital mampu mempermudah proses pengurusan KIA, meningkatkan efisiensi waktu pelayanan, serta mendorong peningkatan kepemilikan KIA di Kota Semarang. Namun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi masih dipengaruhi oleh kesiapan teknologi dan kemampuan pengguna dalam mengakses layanan digital. Penelitian Nadilah dan Jumiati (2024) yang berjudul *Pelaksanaan Pelayanan Kartu Identitas Anak Melalui OASE (Online Anywhere Service) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Lima Kaum* menunjukkan bahwa pelayanan KIA melalui sistem OASE telah memenuhi standar pelayanan publik, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, gangguan jaringan internet, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan online. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal. Selanjutnya, penelitian Matra dan Trimurni (2024) yang berjudul *Implementasi Program Siap Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (Program SI ADIK) pada Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai* menemukan bahwa implementasi program belum berjalan optimal karena masih terdapat keterbatasan pada aspek

sosialisasi, sumber daya, dan kesiapan pelaksana program. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya ditentukan oleh inovasi yang dirancang, tetapi juga oleh dukungan sumber daya dan koordinasi antaraktor pelaksana. Penelitian Fauzan (2025) yang berjudul *Inovasi Pelayanan GALUH SANGGAM dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan* menunjukkan bahwa inovasi pelayanan mampu mempercepat dan mempermudah penerbitan KIA hingga menjangkau masyarakat di tingkat desa. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan peralatan, sumber daya manusia, dan literasi digital masyarakat yang belum merata. Penelitian Madjid dan Gatiningsih (2025) yang berjudul *Analisis Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Pendekatan Teori Difusi Inovasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat* menemukan bahwa keberhasilan peningkatan kepemilikan KIA dipengaruhi oleh proses penyebaran inovasi pelayanan kepada masyarakat melalui komunikasi, sosialisasi, serta dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik inovasi, tingkat penerimaan masyarakat, dan efektivitas penyebaran informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepemilikan KIA. Penelitian Sururama dan Permana (2021) yang berjudul *Pelayanan Administrasi Kartu Identitas Anak (KIA) Secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah* menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem pelayanan online mampu meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan administrasi kependudukan. Namun demikian, efektivitas pelayanan masih dipengaruhi oleh kualitas jaringan internet, kesiapan teknologi, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Sementara itu, penelitian Rahman dan Bura (2024) yang berjudul *Efektivitas Anjungan Dukcapil Mandiri dalam Peningkatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* menemukan bahwa pemanfaatan Anjungan Dukcapil Mandiri mampu meningkatkan kemudahan akses pelayanan dan berkontribusi terhadap peningkatan kepemilikan KIA. Keberhasilan inovasi tersebut didukung oleh kemudahan penggunaan layanan, ketersediaan sarana pendukung, serta akses masyarakat terhadap teknologi pelayanan publik.

1. 4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, sebagian besar penelitian berfokus pada efektivitas pelayanan KIA berbasis digital, implementasi program KIA, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di berbagai daerah. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi inovasi ALPUKAT KESEPIAN di Kabupaten Takalar dengan menggunakan perspektif inovasi sektor publik Osborne dan Brown (2013), yang tidak hanya menganalisis pelaksanaan inovasi, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat serta merumuskan upaya penguatan inovasi dalam meningkatkan kepemilikan KIA. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek penelitian, lokasi penelitian, kerangka analisis yang digunakan, serta fokus kajian yang lebih komprehensif terhadap implementasi dan penguatan inovasi pelayanan KIA.

1. 5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi dalam meningkatkan kepemilikan KIA di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi inovasi ALPUKAT KESEPIAN dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap proses implementasi inovasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan, serta upaya penguatan inovasi dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan. Analisis penelitian menggunakan perspektif inovasi sektor publik Osborne dan Brown (2013) yang menekankan pada inovasi layanan, inovasi proses, inovasi administratif, dan inovasi teknologi dalam pelayanan publik. Pendekatan kualitatif digunakan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika implementasi inovasi ALPUKAT KESEPIAN berdasarkan kondisi empiris di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap enam informan yang terdiri atas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, operator inovasi ALPUKAT KESEPIAN, tenaga kesehatan, dan masyarakat pengguna layanan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelayanan inovasi ALPUKAT KESEPIAN di fasilitas kesehatan dan Dinas Dukcapil Kabupaten Takalar, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa laporan capaian kepemilikan KIA, foto kegiatan, serta dokumen kebijakan terkait inovasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan temuan penelitian yang sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dengan mengaitkan data empiris, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan perspektif inovasi sektor publik Osborne dan Brown (2013), sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kontekstual sesuai kondisi lapangan.

3.1 Implementasi inovasi ALPUKAT KESEPIAN dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupate Takalar Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi inovasi ALPUKAT KESEPIAN telah membawa perubahan terhadap pola pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Takalar. Pelayanan yang sebelumnya bersifat pasif dan terpusat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berubah menjadi lebih proaktif, terintegrasi, dan berbasis fasilitas kesehatan. Melalui inovasi ini, proses penerbitan akta kelahiran dan KIA dapat dilakukan sejak anak lahir di rumah sakit maupun puskesmas melalui kerja sama antara Dinas Dukcapil dan

fasilitas kesehatan. Masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan karena proses pengumpulan berkas, pengiriman data, hingga penerbitan dokumen dilakukan secara terintegrasi melalui sistem digital dan media komunikasi daring.

Tabel 1
Perkembangan Kepemilikan KIA Kabupaten Takalar

Tahun	Jumlah Wajib KIA	Jumlah Memiliki KIA	Persentase
2022	91.141	22.288	24,45%
2023	96.317	26.076	27,07%
2024	96.897	44.043	45,45%
2025	99.400	48.011	48,30%

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025.

Berdasarkan **Tabel 1**, kepemilikan KIA di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan dari 24,45% pada tahun 2022 menjadi 48,30% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa inovasi ALPUKAT KESEPIAN mampu mempercepat pelayanan dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh KIA. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa inovasi mampu memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan melalui integrasi layanan dengan fasilitas kesehatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa inovasi telah berhasil mengurangi hambatan birokrasi yang sebelumnya mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan.

Peningkatan tersebut sejalan dengan pandangan Osborne dan Brown (2013) yang menyatakan bahwa inovasi pelayanan publik bertujuan menciptakan nilai tambah melalui perubahan proses dan mekanisme pelayanan yang lebih efektif. Dalam konteks penelitian ini, nilai tambah yang dihasilkan terlihat dari penyederhanaan prosedur pelayanan, percepatan penerbitan dokumen, serta meningkatnya aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Meskipun demikian, capaian sebesar 48,30% masih berada di bawah target nasional sebesar 60%, sehingga menunjukkan bahwa implementasi inovasi belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan pemerataan kepemilikan KIA.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Inovasi

Tabel 2
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Inovasi ALPUKAT KESEPIAN

Faktor Pendukung	Temuan Lapangan
Kolaborasi lintas sektor	Dukcapil bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas dalam pelayanan KIA
Pemanfaatan teknologi	Penggunaan SIAK dan WhatsApp mempercepat pengiriman data
Kemudahan akses layanan	Orang tua dapat mengurus KIA sejak proses kelahiran

Faktor Penghambat	Temuan Lapangan
Infrastruktur belum merata	Gangguan jaringan internet terutama wilayah kepulauan
Rendahnya pemahaman masyarakat	Masyarakat belum memahami manfaat KIA secara menyeluruh
Keterbatasan SDM	Tidak semua petugas memiliki kemampuan yang sama
Belum adanya insentif yang kuat	Kepemilikan KIA belum memberikan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026.

Berdasarkan **Tabel 2**, keberhasilan implementasi inovasi ALPUKAT KESEPIAN didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan fasilitas kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi, serta kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor yang paling penting karena memungkinkan pelayanan administrasi kependudukan dilakukan sejak anak dilahirkan. Melalui kerja sama tersebut, fasilitas kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi titik awal pelayanan administrasi kependudukan melalui proses pengumpulan berkas dan pengiriman data kepada Dinas Dukcapil. Kondisi ini menunjukkan adanya integrasi pelayanan yang mampu mempersingkat prosedur pelayanan dan mengurangi beban masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Osborne dan Brown (2013) yang menjelaskan bahwa inovasi sektor publik harus mampu menciptakan cara kerja baru yang lebih efektif melalui kolaborasi antarorganisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain kolaborasi, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor pendukung yang berkontribusi terhadap percepatan pelayanan. Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan media komunikasi digital memungkinkan proses pertukaran data antara fasilitas kesehatan dan Dinas Dukcapil dilakukan secara lebih cepat dan efisien dibandingkan mekanisme pelayanan konvensional. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi inovasi ALPUKAT KESEPIAN masih menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan internet yang belum merata pada seluruh wilayah pelayanan. Kondisi ini terutama dirasakan pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses jaringan, sehingga proses pengiriman dan pengolahan data sering mengalami keterlambatan. Temuan tersebut memperkuat penelitian Sururama dan Permana (2021) yang menemukan bahwa keberhasilan pelayanan KIA berbasis online sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan akses internet yang memadai.

Selain faktor infrastruktur, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam implementasi inovasi. Tidak seluruh petugas memiliki tingkat pemahaman dan keterampilan yang sama dalam mengoperasikan sistem pelayanan berbasis digital. Perbedaan kemampuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan kualitas pelayanan antar fasilitas kesehatan. Di samping itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat KIA juga masih menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat masih menganggap KIA hanya sebagai dokumen administratif yang belum memberikan manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan organisasi dan teknologi, tetapi juga dipengaruhi

oleh tingkat kesadaran serta penerimaan masyarakat terhadap inovasi yang dihadirkan pemerintah.

Secara keseluruhan, faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan menunjukkan bahwa implementasi inovasi ALPUKAT KESEPIAN merupakan proses yang dipengaruhi oleh interaksi antara aspek organisasi, teknologi, sumber daya manusia, dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan inovasi tidak cukup hanya mengandalkan digitalisasi pelayanan, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan peningkatan kepemilikan KIA dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

3.3 Upaya penguatan inovasi dalam meningkatkan kepemilikan KIA di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3
Matriks Penguatan Inovasi ALPUKAT KESEPIAN

Permasalahan	Upaya Penguatan
Infrastruktur belum merata	Peningkatan jaringan dan perangkat pelayanan
SDM belum optimal	Pelatihan dan bimbingan teknis berkala
Pemahaman masyarakat rendah	Sosialisasi melalui fasilitas kesehatan dan desa
Insentif belum optimal	Kerja sama dengan sekolah, tempat wisata, dan layanan kesehatan
Monitoring belum maksimal	Evaluasi berkala berbasis indikator kinerja

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026.

Berdasarkan **Tabel 3**, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan inovasi ALPUKAT KESEPIAN perlu dilakukan secara komprehensif melalui lima aspek utama, yaitu penguatan infrastruktur dan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sosialisasi dan edukasi masyarakat, optimalisasi kebijakan dan insentif KIA, serta penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan. Kelima aspek tersebut saling berkaitan dan diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan yang masih ditemukan dalam implementasi inovasi.

Penguatan infrastruktur dan teknologi menjadi prioritas utama karena sebagian besar kendala pelayanan masih berkaitan dengan keterbatasan jaringan internet dan fasilitas pendukung pelayanan. Inovasi yang berbasis digital memerlukan dukungan teknologi yang memadai agar proses pelayanan dapat berjalan secara cepat dan konsisten pada seluruh wilayah pelayanan. Dalam perspektif Digital Era Governance, Dunleavy., dkk. (2006) menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi pelayanan publik berbasis teknologi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur yang mendukung integrasi dan pertukaran data secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas jaringan internet, perangkat komputer, serta sistem pendukung pelayanan menjadi kebutuhan mendasar untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan mampu menjalankan pelayanan secara optimal.

Selain aspek teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting. Keberhasilan inovasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi petugas dalam mengoperasikan sistem pelayanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan tingkat

pemahaman dan kemampuan antarpetugas dalam menjalankan inovasi ALPUKAT KESEPIAN. Oleh karena itu, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkala perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis maupun pemahaman petugas terhadap prosedur pelayanan. Temuan ini sejalan dengan Cordella dan Tempini (2015) yang menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi dan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan sistem pelayanan.

Upaya penguatan berikutnya adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat KIA menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara lebih intensif melalui fasilitas kesehatan, pemerintah desa, sekolah, media sosial, maupun pelayanan jemput bola. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, kesadaran untuk memiliki KIA akan semakin tinggi sehingga dapat mendorong peningkatan kepemilikan KIA secara lebih luas dan merata.

Selanjutnya, optimalisasi kebijakan dan insentif KIA perlu dilakukan agar kepemilikan KIA memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan KIA sebagai instrumen pemberian insentif belum berjalan secara optimal. Padahal, dalam perspektif Osborne dan Brown (2013), inovasi pelayanan publik yang efektif harus mampu menciptakan nilai tambah (*public value*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Bentuk insentif yang dapat dikembangkan antara lain pemberian potongan biaya masuk tempat wisata daerah bagi anak pemilik KIA, prioritas akses pada program pelayanan tertentu, diskon kegiatan pendidikan nonformal, kemudahan pendaftaran kegiatan anak, serta kerja sama dengan pelaku usaha lokal yang menyediakan layanan ramah anak. Adanya manfaat yang dirasakan secara langsung akan meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengurus KIA sehingga dapat memperkuat daya dorong inovasi dalam meningkatkan kepemilikan KIA.

Terakhir, penguatan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi inovasi berjalan sesuai tujuan dan mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan kondisi di lapangan. Monitoring tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran organisasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan. Dinas Dukcapil perlu menyusun indikator kinerja yang mencakup aspek kuantitas dan kualitas pelayanan, seperti jumlah penerbitan KIA, kecepatan pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, serta capaian kepemilikan KIA pada setiap wilayah. Menurut Hartley (2005), inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan memerlukan proses evaluasi yang terus-menerus agar organisasi mampu belajar, beradaptasi, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang berbasis data, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi permasalahan secara lebih cepat dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan efektivitas inovasi ALPUKAT KESEPIAN.

Dengan demikian, upaya penguatan yang dirumuskan dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan mengatasi hambatan implementasi yang ada, tetapi juga menjadi strategi untuk memastikan keberlanjutan inovasi ALPUKAT KESEPIAN dalam meningkatkan kepemilikan KIA secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Takalar.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi ALPUKAT KESEPIAN mampu meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui integrasi pelayanan administrasi kependudukan dengan fasilitas kesehatan. Inovasi ini berhasil mengubah pola pelayanan yang sebelumnya bersifat pasif dan terpusat di kantor Dinas Dukcapil menjadi pelayanan yang lebih proaktif, terintegrasi, dan dekat dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan KIA di Kabupaten Takalar meningkat dari 24,45% pada tahun 2022 menjadi 48,30% pada tahun 2025. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rachmat et al. (2023) yang menemukan bahwa inovasi pelayanan KIA melalui aplikasi Si D'nOK di Kota Semarang mampu mempermudah proses pelayanan, meningkatkan efisiensi waktu, serta mendorong peningkatan kepemilikan KIA. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dan penyederhanaan prosedur pelayanan merupakan faktor penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Nadilah dan Jumiati (2024) yang menunjukkan bahwa pelayanan KIA berbasis OASE telah memenuhi standar pelayanan meskipun masih menghadapi kendala teknis dan perlunya peningkatan edukasi kepada masyarakat. Pada penelitian ini ditemukan bahwa meskipun ALPUKAT KESEPIAN berhasil meningkatkan akses pelayanan, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan jaringan internet, perbedaan kualitas sarana pelayanan, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat KIA. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur dan kualitas implementasi di lapangan.

Hasil penelitian juga memiliki kesamaan dengan penelitian Matra dan Ttrimurni (2024) yang menemukan bahwa implementasi Program SI ADIK di Kota Binjai belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala pada aspek sosialisasi, sumber daya, dan kesiapan pelaksana. Dalam penelitian ini, faktor sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi hambatan utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ALPUKAT KESEPIAN. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kapasitas pelaksana dan edukasi masyarakat merupakan tantangan yang umum ditemui dalam implementasi inovasi pelayanan KIA di berbagai daerah.

Selanjutnya, temuan penelitian ini mendukung penelitian Fauzan (2025) mengenai inovasi GALUH SANGGAM yang mampu mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat desa, namun masih menghadapi kendala keterbatasan sarana, SDM, dan literasi digital masyarakat. Perbedaannya, ALPUKAT KESEPIAN menempatkan fasilitas kesehatan sebagai titik utama pelayanan sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan sejak anak lahir. Temuan ini menunjukkan adanya bentuk inovasi pelayanan yang lebih preventif dan terintegrasi dibandingkan inovasi pelayanan yang hanya berfokus pada perluasan jangkauan pelayanan ke wilayah administratif tertentu.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Madjid dan Gatiningsih (2024) yang menemukan bahwa keberhasilan peningkatan kepemilikan KIA tidak hanya ditentukan oleh keberadaan inovasi pelayanan, tetapi juga dipengaruhi oleh proses difusi inovasi kepada masyarakat. Dalam konteks inovasi ALPUKAT KESEPIAN, sosialisasi melalui fasilitas kesehatan, koordinasi lintas sektor, serta kemudahan akses pelayanan menjadi faktor yang

mempercepat penerimaan masyarakat terhadap layanan KIA sehingga berkontribusi pada peningkatan angka kepemilikan KIA di Kabupaten Takalar.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan Osborne dan Brown (2013), Hartley (2005), Bekkers et al. (2016), serta Cordella dan Tempini (2015) yang menyatakan bahwa keberhasilan inovasi sektor publik dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan teknologi, sumber daya manusia, kolaborasi antaraktor, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kepemilikan KIA tidak cukup hanya melalui penyediaan layanan yang lebih cepat, tetapi memerlukan penguatan infrastruktur, kapasitas pelaksana, sosialisasi masyarakat, kebijakan insentif, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar inovasi dapat memberikan dampak yang lebih optimal dan merata.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi inovasi ALPUKAT KESEPIAN di Kabupaten Takalar telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui integrasi pelayanan administrasi kependudukan dengan fasilitas kesehatan. Inovasi ini berhasil menyederhanakan prosedur pelayanan, mempercepat penerbitan dokumen, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya capaian kepemilikan KIA dari 24,45% pada tahun 2022 menjadi 48,30% pada tahun 2025. Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target nasional sehingga menunjukkan bahwa implementasi inovasi belum sepenuhnya optimal dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Takalar.

Keberhasilan implementasi inovasi ALPUKAT KESEPIAN dipengaruhi oleh adanya kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan fasilitas kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta kemudahan akses layanan yang diberikan kepada masyarakat. Di sisi lain, implementasi inovasi masih menghadapi berbagai hambatan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan internet, belum meratanya kapasitas sumber daya manusia pelaksana, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat KIA, serta belum optimalnya kebijakan insentif yang dapat mendorong peningkatan kepemilikan KIA.

Untuk meningkatkan efektivitas inovasi ALPUKAT KESEPIAN, diperlukan penguatan secara komprehensif melalui peningkatan infrastruktur dan teknologi pelayanan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, optimalisasi kebijakan dan insentif kepemilikan KIA, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berbasis data. Penguatan pada aspek-aspek tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan, mengurangi kesenjangan kepemilikan KIA antarwilayah, serta mendukung terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Takalar.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada ruang lingkup penelitian yang hanya difokuskan pada implementasi inovasi ALPUKAT KESEPIAN di Kabupaten Takalar sebagai studi kasus. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan

pengumpulan data lebih banyak dilakukan pada periode implementasi yang sedang berlangsung sehingga belum dapat mengamati dampak inovasi dalam jangka panjang terhadap kepemilikan KIA secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa temuan penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif terhadap berbagai inovasi pelayanan KIA di daerah lain, mengukur efektivitas inovasi secara kuantitatif dalam jangka panjang, serta mengkaji pengaruh faktor sosial, budaya, dan digitalisasi pelayanan terhadap peningkatan kepemilikan KIA. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat menghasilkan model inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif dan dapat direplikasi pada berbagai daerah di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Takalar beserta jajarannya, pihak fasilitas kesehatan, serta seluruh informan penelitian yang telah memberikan kesempatan, dukungan, data, dan informasi selama proses penelitian berlangsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bekkers, V., Edelonbos, J., & Steijn, B. (2011). *Innovation in The Public Sector: Linking Capacity and Leadership*. *Public Management Review*. https://www.researchgate.net/publication/261215374_Innovation_in_the_Public_Sector_Linking_Capacity_and_Leadership/link/57d1549c08ae5f03b48a77eb/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

Cordella, A., & Tempini, N. (2015). *E-government and Organizational Change: Reappraising the Role of ICT and Bureaucracy in Public Service Delivery*. *Government Information Quarterly*, 32(3), 279–286. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740624X15000556

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Profil Data Penduduk (2020-2025). Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). *New Public Management is Dead—Long Live Digital-Era Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494. https://www.researchgate.net/publication/228301216_New_Public_Management_Is_Dead_-_Long_Live_Digital-Era_Governance

Fauzan, M. N. (2025). Inovasi Pelayanan GALUH SANGAM dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. https://eprints.ipdn.ac.id/22035/1/DOC-20250519-WA0009..pdf

Hartley, J. (2005). *Innovation in Governance and Public Services: Past and Present*. *Public Money & Management*, 25(1), 27–34. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9302.2005.00447.x

Hutasoit, I. (2017). Administrasi Kependudukan dan Tata Kelola Data Penduduk. Prenada Media.

Madjid, U., & Gatiningsih. (2025). Analisis Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Pendekatan Teori Difusi Inovasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Jurnal *Registratie*. https://journal2.unfari.ac.id/index.php/ICOSEI/en/article/view/1589

Matra, C. A., & Trimurni, F. (2024). Implementasi Program Siap Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (Program SI ADIK) pada tingkat sekolah dasar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10(1). https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/16400

Nadilah, A. E., & Jumiati. (2024). Pelaksanaan pelayanan Kartu Identitas Anak melalui OASE *(Online Anywhere Service*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Lima Kaum. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 5(*1*). https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.65

Osborne, S. P., & Brown, L. (2013). *Handbook of Innovation in Public Services*. *Edward Elgar Publishing*. https://doi.org/10.4337/9781849809757

Rachmat, I., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2023). Inovasi Pelayanan KIA secara *Online* melalui Aplikasi Si D'nOK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, 12(3), 609–628. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/39933

Rahman, S., & Bura, A. F. (2024). Efektivitas Anjungan Dukcapil Mandiri dalam Peningkatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal *Registratie*, 7(1). http://eprints.ipdn.ac.id/12594/1/SAFNI%20RAHMAN_30.0749_I-6_EFEKTIVITAS%20ANJUNGAN%20DUKCAPIL%20MANDIRI%20DALAM%20PENIENGKATAN%20KEPEMILIAKN%20KARTU%20IDENTITAS%20ANAK%20%28KIA%29%20DI%20DINAS%20KEPENDUDUKAN%20DAN%20PENCATATAN%20SIPIL%20KABUPATEN%20SLEMAN%20PROVINSI%20DAERAH%20ISTIMEWA%20YOGY.pdf

Sururama, R., & Permana, A. F. B. (2021). Pelayanan administrasi Kartu Identitas Anak (KIA) secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah. Jurnal Media Birokrasi, 3(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB